



Perjalanan Dinas jadi Can Tepi

■ Gubernur Midji Ungkap Perilaku Kadis
 ■ Efisiensi 2019 Capai Rp 104 Miliar



Selama ini pegawai berpendapat, bahwa perjalanan dinas itu adalah bagian dari penghasilan tambahan.

Sutarmidji
Gubernur Kalbar

PONTIANAK, TRIBUN - Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji terus melakukan upaya transparansi dalam mengelola keuangan pemerintahan. Mantan Wali Kota Pontianak dua periode ini, melakukan efisiensi keuangan. Satu diantara efisiensi yang dilakukan yakni memangkas biaya perjalanan dinas pejabat daerah.

Ia menyampaikan pemotongan biaya perjalanan dinas pada tahun anggaran 2019 ini bisa menggratiskan sekolah pada jenjang SMA.

Ia meminta Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemprov Kalbar mengubah mindset bahwa perjalanan dinas bukanlah bagian dari penghasilan tambahan atau *can tepi* dalam bahasa Pontianak.

"Ada kepala dinas yang menjadikan perjalanan dinas sebagai *can tepi*," ucap Midji disambut gelak tawa audiens yang hadir dalam Rakor Pengawasan Daerah Tahun 2019 dan Pembahasan PKPT 2019 di Aula Kantor Inspektorat, Jl Sutan

■ Bersambung ke hal. 7



- Biaya perjalanan dinas Rp 244 miliar
- Midji memangkas perjalanan dinas menjadi Rp 140 miliar
- Sisa Rp 104 miliar lantas dialokasikan untuk biaya pendidikan gratis (SMA-SMK) negeri
- Dari Rp 104 miliar yang dialokasi untuk pendidikan gratis, masih terdapat sisa uang yang kemudian dialokasikan untuk membeli meubeler sejumlah 20 ribu set
- Selama perjalanan anggaran 2019 biaya perjalanan dinas bisa diefisienkan kembali sebesar Rp 40 miliar dari total alokasi anggaran Rp140 miliar

Sumber: Gubernur Kalbar
GRAFIK: ENPA, DATA: ONI



Perjalanan Dinas jadi Can Tepi

Sambungan Hal.1

Syahrir, Rabu (6/11).

Ditemui seusai acara, Midji tak memungkiri sebagian ASN masih berpikiran saat perjalanan dinas adalah bagian dari penghasilan tambahan. "Selama ini pegawai berpendapat, bahwa perjalanan dinas itu adalah bagian dari penghasilan tambahan. Padahal enggak, *mane ade* perjalanan dinas itu menguntungkan dan nambah pendapatan. Kecuali perjalanan dinas fiktif," ujar Sutarmidji saat diwawancarai *Tribun*.

Ia menegaskan apabila perjalanan dinas yang betul-betul melakukan tugas dan fungsinya pasti rugi bukan malah untung. Oleh karena itu, ia meminta seluruh jajaran untuk mengubah *mainset* terkait perjalanan dinas menambah penghasilan. "Kalau perjalanan dinas yang benar pasti rugi, tak *ade* untung. *Saye* tegaskan enggak *bise* perjalanan dinas mebahambah penghasilan, kecuali fiktif," tegasnya.

Dalam upaya efisiensi perjalanan dinas, seluruh surat tugas ditandatangani dirinya sendiri, sehingga tidak boleh ada yang main berangkat saja. "Kite efisiensikan perjalanan dinas dan *semue* izin perjalanan dinas *saye* yang langsung tanda tangani. Surat tugasnya saya langsung tanda tangan," ungkapny.

Dalam menandatangani surat tugas untuk perjalanan dinas, Midji menceritakan ia selalu mempelajari pola-pola yang dilakukan para kepala dinas dan jajarannya. Apabila polanya tidak betul

maka ia tidak akan menandatangani. "Kalau cukup pakai telepon *kenape* harus pergi. Kalau *bise* berangkat satu orang *mengape* harus dua-*tige* orang," tambahnya.

Disampaikan Sutarmidji, dari APBD 2019 yang disahkan pada awal ia dilantik sebagai Gubernur Kalbar akhir 2018 lalu, penghematan perjalanan dinas di Kalbar sudah Rp 104 miliar dan itu dialihlkan pada pembiayaan pendidikan SMA. "Bahkan setelah saya lihat anggaran yang ada, penghematan atau efisiensi yang terjadi dari alokasi perjalanan dinas tahun ini bisa mencapai Rp 40 miliar sampai akhir tahun," jelasnya.

Adanya efisiensi kembali dari alokasi perjalanan dinas 2019 mencapai Rp 40 miliar, jelas Midji, menegaskan total efisiensi dari alokasi perjalanan dinas akan mencapai 140 miliar lebih. Bahkan saat pertama ia lakukan pada penyusunan anggaran 2019 lalu, satu diantara hal yang ditanyakannya pada Kepala BPKPD adalah berapa besar uang perjalanan dinas. Kala itu Kepala BPKPD menjawab setahun perjalanan dinas di provinsi mencapai Rp 244 miliar.

Begitu mendengar jumlah anggaran perjalanan dinas, ia tegaskan anggaran itu harus dijadikan Rp 140 miliar, dan Rp 104 miliar dialokasikan untuk memberikan beasiswa kepada 142 ribu anak SMA dan SMK negeri. Setelah Rp 104 miliar dialokasikan untuk biaya SMA-SMK negeri, Midji kembali

bertanya pada Kadisdikbud, Suprianus Hermian apakah masih ada sisa anggaran Rp 104 miliar itu. Kala itu Suprianus Herman menjawab masih. Midji langsung minta agar sisa anggaran dibelikan meubeler sekolah dan dapat 20 ribu set.

Tak Ada Kepentingan

Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmidji, saat membuka rapat koordinasi daerah tahun 2019 dan pembahasan PKPT 2019 menyampaikan bahwa Inspektorat Daerah silakan awasi dirinya dan wakil gubernur. Ia memastikan gubernur dan wakil tidak terbebas dari pemeriksaan maka apabila ada kesalahan silakan ditegur dan diperiksa.

"Saya pastikan satu persipun tidak ada kepentingan saya pada APBD itu. Maka kalau ada temuan pada dinas, saya pastikan akan langsung copot tanpa evaluasi dua tahun dan seterusnya," kata Midji, Rabu (6/11).

Ia memberikan peluang seluas-luasnya pada Inspektorat Daerah untuk mengawasi siapa saja di Provinsi Kalbar. Kalau ada temuan Inspektorat Daerah juga bertanggungjawab, ke depan ia katakan bisa saja setiap tahun Inspektur diganti.

Ia menekankan jangan sampai ada penyimpanan lagi pada pemerintah provinsi, tara kelola pemerintahan Kalbar harus lebih baik. "Kita janji *semuenuya*, kalau APBD 2019 Kalbar masih ada temuan dari BPK maka harus bertanggungjawab dan kepala dinasnya saya

copot," tegasnya.

Inspektur Inspektorat Provinsi Kalbar, Marlyna Al-Muthahar, menegaskan pihaknya akan melakukan pengawasan terhadap perjalanan dinas yang dilakukan pegawai Pemprov. Saat ini ditegaskannya perjalanan dinas sudah sangat selektif semenjak Gubernur Kalbar Sutarmidji menjabat.

"Sekarang perjalanan dinas di Provinsi Kalbar memang sudah sangat selektif. Artinya tidak lagi seperti yang lalu-lalu. Pak Gubernur sendiri sudah mengatakan kalau efisiensi dari anggaran perjalanan dinas 2019 ada Rp 140 miliaran," ujar Marlyna kepada *Tribun*.

Ia menegaskan dari Inspektorat juga melakukan pengawasan, betul tidak perjalanan dinas yang dilakukan para pegawai dan kepala dinas tersebut. "Kita mengawasi hasilnya apa, laporannya bagaimana dan tujuannya kemana. Kita akan tinjau aspek perjalanan dinas ini harus jelas," tegasnya.

Selain itu, di Inspektorat Daerah sendiri berusaha melakukan efisiensi terhadap perjalanan dinas. Ia mencontohkan kalau bisa 10 hari mengapa harus 15 hari. Namun, apabila memang butuh 15 hari karena ada yang perlu pendalaman maka segitulah waktunya. Tapi ia menegaskan harus betul-betul melakukan efisiensi dalam perjalanan dinas ini. Hal ini sesuai dengan arahan Gubernur Kalbar Sutarmidji. **(oni)**